



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERDAGANGAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik senantiasa mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan, kondisi internal dan eksternal organisasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Sumatera Selatan maupun isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Strategis OPD dengan berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Tahun 2024 Triwulan IV menyumbang rata-rata 13,85% terhadap PDRB Sumsel menurut Lapangan Usaha, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 13,40%. Pengembangan Perdagangan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 diarahkan kepada upaya menjawab tantangan ke depan meliputi posisi dan kondisi strategis Sumatera Selatan dapat dioptimalkan menjadi pusat kemajuan dan pemacu pertumbuhan wilayah di Sumatera Selatan, arus peningkatan perdagangan, dan mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR). Pembangunan Perdagangan meningkatkan kinerja ekspor non migas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan juga harus berpedoman pada Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian Perdagangan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan 2025-2029 difokuskan pada 4 (empat) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yaitu: (1) Peningkatan daya saing; (2) perluasan pasar; (3) Transformasi digital, serta (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perdagangan. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki 7 (tujuh) arah kebijakan, yaitu: (1) Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor; (2) Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri; (3) Pengembangan Perdagangan Berkeadilan; (4) Penguatan Peran Lembaga Usaha Perdagangan; (5) Peningkatan perlindungan Konsumen; (6) Peningkatan Kinerja Perdagangan yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional; (7) Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum menyusun Rencana Strategis adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024;

11. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarutamaan Gender di Daerah dan Mempedomani kaidah-kaidah yang diatur dalam Peraturan Tersebut;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah :

- Sebagai pedoman yang bersifat yuridis formal bagi aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan untuk mencapai sasaran.
- Sebagai sarana untuk melaksanakan keterpaduan pelaksanaan program dengan unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi antar unit kerja melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Sebagai tolak ukur bagi aparat pengawasan dalam mengukur, menganalisis, mengevaluasi serta menilai kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- Dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan taraf kehidupan perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029
- 3.3 Penahapan Pembangunan
- 3.4 Penyajian Lokus
- 3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan merupakan perangkat daerah yang baru setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana melalui Peraturan Daerah tersebut terbentuklah Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dari sebelumnya tergabung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Daerah yang memuat :

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

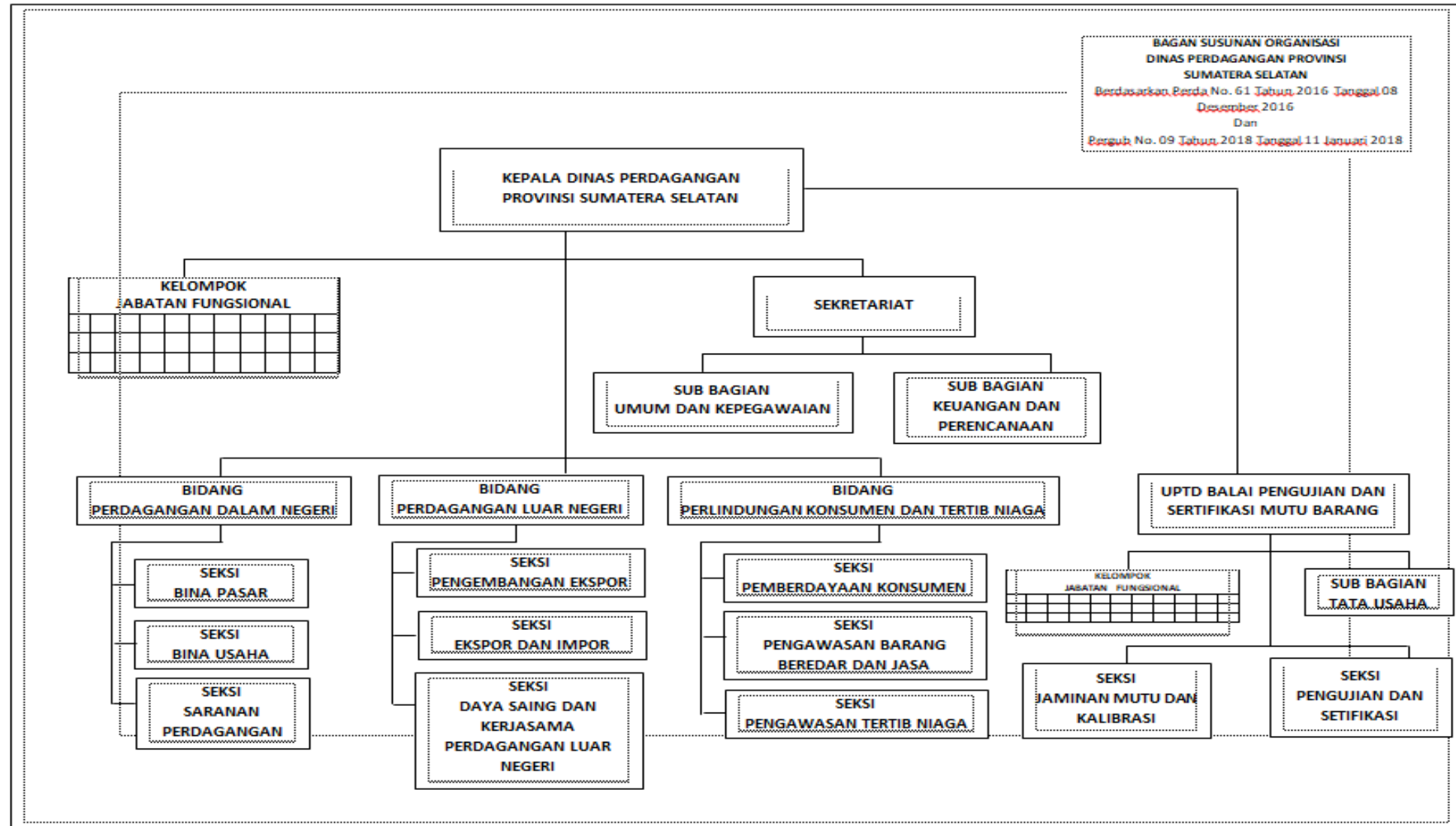
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan. Serta mengemban fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana dan Program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian Perdagangan;
- Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan serta perizinan;
- Pelaksanaan program kegiatan sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi;
- Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;

- Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan;
- Pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrolagian;
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan hukum;
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan



Masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, beberapa tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbagian Keuangan dan Perencanaan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan
 - 2. Seksi Bina Pasar
 - 3. Seksi Sarana Perdagangan
- d. Bidang Perdagangan Luar Negeri yang membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Ekspor
 - 2. Seksi Peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
 - 3. Seksi Ekspor dan Impor
- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - 1. Seksi Pemberdayaan Konsumen
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - 3. Seksi Pengawasan Tertib Niaga
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri :
 - 1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, sedangkan fungsinya sebagai berikut adalah :

- a. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan serta perizinan;
- c. Pelaksanaan kegiatan program sektor perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi;
- e. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan;
- h. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum dan perpustakaan;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana dan program, penyusunan dan evaluasi, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan, sedangkan fungsinya :

- a. Pengelolaan dan administrasi ketatausahaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha peningkatan kerja sama serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri, sedangkan fungsinya :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina pasar, bina usaha dan sarana perdagangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi izin di bidang usaha perdagangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan fasilitasi sarana perdagangan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan informasi pasar dan stabilitas kerja; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan dukungan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor, promosi dan kerjasama Luar Negeri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha di bidang Perdagangan Luar Negeri;
- b. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor;
- c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri;
- d. Penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan promosi dan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Perdagangan Luar Negeri;
- e. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan jasa serta pengawasan kemetrologian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan Pelaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan kemetrolagian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk memperkuat Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 yaitu :

1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB)

mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan di bidang standarisasi dan pengawasan mutu barang;
- b. Menyusun dan mengembangkan sistem jaminan mutu untuk mencapai pemenuhan Standar Internasional (ISO-IEC 17025) dengan mempersiapkan dokumen mutu laboratorium;
- c. Melaksanakan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- d. Melaksanakan pengawasan mutu produk bertanda SNI;
- e. Melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka sertifikasi produk penggunaan tanda SNI;
- f. Melaksanakan pengawasan mutu barang yang beredar dipasaran baik produk dalam negeri maupun eks impor dalam rangka perlindungan konsumen;
- g. Melakukan pengawasan produk impor dalam rangka perlindungan produk lokal;
- h. Melaksanakan pengembangan serta penyusunan standar dan metode pengujian;

- i. Melaksanakan pelayanan jasa di bidang standarisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis pada dunia usaha dan masyarakat;
- j. Melaksanakan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
- k. Memberikan bimbingan teknis di bidang mutu kepada dunia usaha dan masyarakat;
- l. Melaksanakan pelatihan di bidang teknis pengujian dan kalibrasi;
- m. Memberikan bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;
- n. Melakukan pengolahan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
- o. Melakukan kegiatan analisa dan evaluasi data hasil pengujian serta data yang berkaitan dengan pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) terdiri dari:

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian dan Sertifikasi
- d. Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 31 Desember 2024 memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 88 orang, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Jumlah	Keterangan
Aparatur Sipil Negara (ASN)	40 orang	
Tenaga Honorer	7 orang	
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	41 orang	
Jumlah	88 orang	

Komposisi ASN dan Non ASN berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut berikut :

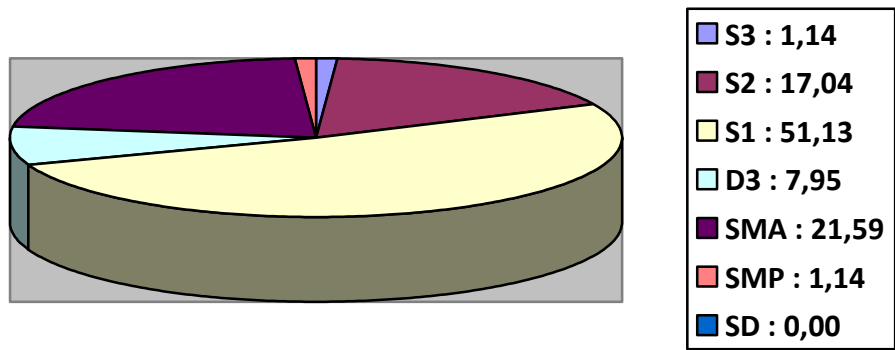
Tabel 2.1.2.2 Komposisi ASN dan Non ASN
berdasarkan jenis kelamin

Uraian	Jumlah Total Pegawai	Jenis Kelamin Pria	Jenis Kelamin Wanita
Sekretariat	24 orang	11 orang	13 orang
Bidang PDN	11 orang	7 orang	6 orang
Bidang PLN	16 orang	10 orang	6 orang
Bidang PKTN	14 orang	11 orang	2 orang
UPTD BPSMB	23 orang	12 orang	10 orang
Jumlah	88 orang	51 orang	37 orang

Komposisi pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan :

- S3 : 1 orang
- S2 : 15 orang
- S1 : 45 orang
- D3 : 7 orang
- SMA : 19 orang
- SMP : 1 orang
- SD : - orang

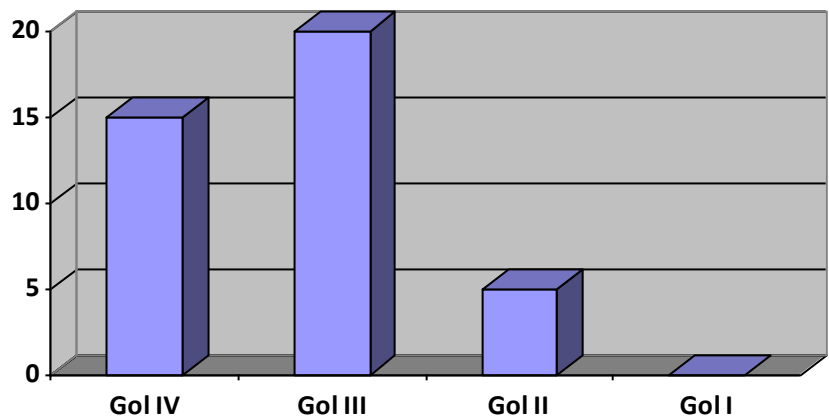
Gambar 2.1.2.1
Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan



Komposisi pegawai berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 15 orang
- Golongan III : 20 orang
- Golongan II : 5 orang
- Golongan I : - orang

Gambar 2.1.2.2
Komposisi ASN berdasarkan Golongan



Dilihat dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa jumlah terbesar personil ASN yang ada adalah Golongan III sebanyak 30 orang, jika dilihat dari tingkat pendidikan masih ada yang latar belakang pendidikannya SMA.

Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas dan kompetensi personil yang ada harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual.

Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Perdagangan baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional sampai Desember 2024 adalah :

a. Pejabat Struktural

Jabatan Struktural berjumlah 20 orang, terdiri dari :

- 1 eselon II A
- 5 eselon III A
- 14 eselon IV A

b. Pejabat Fungsional

Pejabat fungsional pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 9 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Fungsional Penguji Mutu Barang : 4 orang
- Fungsional Pengawas Perdagangan : 4 orang
- Fungsional Analis Perdagangan : 1 orang

Kegiatan Kesekretariatan lainnya adalah menyelenggarakan penataan, penerbitan dan pengelolaan aset negara atau barang-barang inventaris baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari beberapa macam barang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2.4 Daftar Aset Barang Tidak Bergerak
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Jenis/Macam Barang	Satuan M ² /Buah	Alamat
I.	Tanah, Bangunan Kantor		
1.	Tanah, Bangunan Kantor, Kantor UPTD BPSMB	43,484 M ²	Jl. Demang Lebar Daun No. 2610 Palembang
2.	Tanah, Bangunan Kantor, Gudang Metrologi	535 M ²	Jl. H.M Nurdin Panji Kel. Karya Baru
II.	Tanah, Bangunan Rumah		
1.	Tanah, Bangunan Rumah	777 M ²	Jl. Kapten A. Rivai No. 94 Kel. 26 Ilir Palembang
2.	Tanah, Bangunan Rumah	228 M ²	Jl. AKBP Cek Agus No. 5 Kel. 8 Ilir Palembang
3.	Tanah, Bangunan Rumah	1008 M ²	Jl. Murai No. 532, 533 Kel. 9 Ilir Palembang
4.	Tanah, Bangunan Rumah	225 M ²	Jl. AKBP H. Umar Lrg. Ario Baru 125, 126 Kel. Ario Kemuning Palembang
5.	Tanah, Bangunan Rumah	3581 M ²	Jl. Tanjung Siapi-api Desa Muara Sunsang Kec.Banyuasin II Kab. Banyuasin
6.	Pilar/tugu/tanda lainnya	2 buah	Jl. Demang Lebar Daun No. 2610 Palembang

Tabel 2.1.2.5 Daftar Aset Barang Bergerak
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Jenis/Macam Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	12 unit	Kendaraan Roda Empat tersebut diperuntukkan sebagai kendaraan operasional: - 10 unit kendaraan operasional Dinas Perdagangan. - 2 unit kendaraan operasional UPTD BPSMB.
2.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2 unit	Kendaraan operasional roda 2 (Dua) diperuntukkan untuk Dinas Perdagangan
3.	Peralatan Kantor : - PC Unit/Komputer	17 unit	- 10 unit pada Bidang - 7 unit pada Sekretariat
	- Note Book/Laptop	4 unit	- 1 unit pada bidang PPDN - 3 unit pada SEKRETARIAT
	- Meja Kerja	118 buah	
	- Kursi Kerja	117 unit	
	- Kursi Besi/Bangku tungg	2 unit	
	- Sofa	3 set	
	- Meja Resepsionis	1 unit	
	- AC	20 unit	Terdiri dari AC split dan AC window
	- Pompa Air	1 unit	
	- CCTV – Camera Control Television Sytem	1 paket	1 unit pada staf umum
	- Wireless	1 unit	
	- Mesin Penghancur kertas	1 buah	
	- Kulkas 1 pintu	1 buah	1 unit pada ruang Kepala Dinas
	- Kulkas 2 pintu	1 buah	1 unit pada Keuangan
	- Filling Cabinet	4 buah	
	- Faximile	1 buah	1 Unit pada ruang Kepala Dinas
	- Printer	10 unit	
	- Komputer	17 set	10 Unit pada Bidang 7 Unit pada Sekretariat 7 Unit Sekretariat 1 Unit pada UPTD
	- Laptop	8 unit	
	- LCD Projector/Infocus	1 unit	
	- Lemari Arsip	6 unit	
	- Camera Elektronik	1 buah	
	- Televisi	2 buah	
	- Dispenser	3 buah	
	- Gordin/kray	1 paket	
	- Alat Pemadam Kebakaran	2 unit	

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini yang akan dibahas hanya kinerja pelayanan di sektor perdagangan. Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, tingkat capaian kinerja berdasarkan RENSTRA Tahun 2024 – 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T-C.23 PMDN 86/2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB				n/a	13,25-13,50	13,50-13,75	13,75-14,00	13,85	n/a	13,73,95	12,95	13,45	13,85	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Ekspor Barang dan Jasa				9,6 – 9,8	9,8 - 10	10 – 10,2	10,2-10,4	16,84	-1,32	5,79	10,41	7,6	7,42	-13,75	59,082	104,1	74,51	82,44
3	Koefisien Variasi Harga antar wilayah Tingkat Provinsi				≤10	≤10	≤5	≤5	6,13	4,4	4,7	7,5	4,7	6,13	44	47	75	47	81,57
4	Neraca Perdagangan				2.909	2.923	2.938	2.953	5.125	2.663,7	4.334,7	6.670,1	5.421,12	4.652,89	92	148	227	184	90,78
5	Persentase penanganan pengaduan konsumen				90	90	90	90	90	98	91,26	97,06	94,90	95,24	108,889	101,4	107,84	105,44	105,82
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan				8,70	30	30	30	70	9,56	59,13	56,58	42,05	23,18	109,885	197,1	188,6	140,17	33,10
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok				100	100	100	100	100	100	100	66,67	98,14	95,61	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio capaian renstra rata – rata di atas 80% dan ada yang melebihi 100% yang berarti bahwa realisasinya sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Namun ada beberapa indikator yang belum mencapai target. Untuk lebih lengkapnya capaian kinerja sektor perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Bidang Perdagangan Luar negeri

Pertumbuhan Neraca Perdagangan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 sampai 2022 neraca perdagangan mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2023 sampai 2024 terdapat penurunan dikarenakan ketidakpastian pasar global dan tarif ekspor/impor barang dari Negara Amerika yang berlaku.

Komoditi-komoditi ekspor Sumatera Selatan pada umumnya masih didominasi oleh Karet, Batubara, CPO dan produk turunannya, Pulp, Produk Kayu dan produk turunannya. Adapun negara tujuan ekspor didominasi oleh negara-negara seperti China, Amerika Serikat, Malaysia dan India.

b. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Selama tahun 2020 – 2024 harga bahan pokok relatif stabil, fluktuasi perubahan harga barang pokok masih dibawah 10% walaupun ada beberapa komoditi yang lebih dari 10% seperti gula pasir, cabe merah besar, cabe merah keriting, bawang merah dan bawang putih. Perkembangan harga yang demikian tersebut merupakan indikator adanya kendala yang terjadi pada pasokan/logistik, sistem distribusi dan secara empiris permintaan meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan. Tapi secara keseluruhan masih stabil karena tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan masih pada kisaran $\pm 4\%$.

Hasil survey Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan adalah 56,26 yang menunjukkan bahwa

keberdayaan konsumen Sumatera Selatan berada dalam level mampu artinya konsumen telah mampu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai konsumen untuk menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri. Jumlah pengaduan konsumen rata-rata per tahun 2021 dan 2022 diatas dari 100 (Tahun 2021 sebanyak 103 pengaduan/informasi dan di tahun 2022 sebanyak 109 pengaduan/informasi). Sedangkan di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan, di tahun 2023 jumlah pengaduan konsumen sebanyak 97 kasus, dan di tahun 2024 jumlah pengaduan konsumen sebanyak 84 kasus. Selain itu tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan terkait perlindungan konsumen pun masih relatif rendah, salah satunya tercermin dari rendahnya persentase barang beredar yang sesuai ketentuan SNI wajib.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perdagangan mempunyai 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yaitu : UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB). UPTD BPSMB melakukan pelayanan dalam bidang pengujian mutu barang dan audit sistema manajemen mutu. Dalam pelaksanaan pelayanan UPTD tersebut selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1.3.2
Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 – 2024

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	UPTD BPSMB	Contoh	756	892	720	0
	- Pengujian mutu barang - Penerimaan retribusi	Rp.	164.305.000	203.405.000	106.015.000	0

Realisasi penerimaan Pelayanan Jasa Teknis UPTD BPSMB Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 telah mencapai target, sampai dengan Desember 2023 mencapai 101,70 %

dari target yang telah ditetapkan. Dari 720 contoh/sample, jumlah sample pengujian terbanyak pada komoditi karet SIR yaitu sebanyak 700 sample.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Retribusi pada UPTD BPSMB Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2024 dihapuskan atau di 0 (Nol) kan.

Adapun untuk kinerja anggaran Dinas Perdagangan selama periode renstra sebelumnya (tahun 2021 sampai dengan 2024) baik target, realisasi maupun rasio capaiannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 (T-C.24 PMDN 86/2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
***)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)	(17)
PENDAPATAN																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Pendapatan Retribusi Daerah																	
Retribusi Pengawasan dan Pengujian Mutu	70.000.000	90.000.000	200.000.000	130.000.000	0,00	153.590.000	164.305.000	203.405.000	106.015.000	0,00	219,41	182,56	101,70	81,55	0,00		
BELANJA OPERASI	12.077.144.419	13.345.664.000	20.093.632.300	19.511.503.572	12.766.402.192	11.165.206.408	12.676.099.939	18.060.531.668	18.149.283.414	12.010.571.719	92,45	94,98	89,88	93,02	94,08		
Belanja Pegawai	8.638.450.000	7.817.464.000	9.012.308.000	8.986.900.000	8.328.096.887	7.838.044.668	7.399.691.327	8.149.615.944	7.837.167.514	7.660.536.700	90,73	94,66	90,43	87,21	91,98		
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.806.435.000	4.585.404.000	4.487.624.000	4.449.425.000	4.303.760.887	4.594.688.013	4.347.628.825	4.045.419.363	4.014.832.309	3.911.086.981	95,59	94,81	90,15	90,23	90,88		
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.832.015.000	3.232.060.000	4.524.684.000	4.285.595.000	3.830.536.000	3.243.356.655	3.052.062.502	4.104.196.581	3.579.755.205	3.569.499.719	84,64	94,43	90,71	83,53	93,19		
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	251.880.000	193.800.000	0,00	0,00	0,00	242.580.000	179.950.000	0,00	0,00	0,00	96,31	92,85		
Belanja Barang dan Jasa	3.438.694.419	5.528.200.000	11.081.324.300	10.524.603.572	4.438.305.305	3.327.161.740	5.276.408.612	9.910.915.724	10.312.115.900	4.350.035.019	96,76	95,45	89,44	97,98	98,01		
Belanja Bahan Habis Pakai	108.267.279	1.225.294.448	5.139.802.128	4.610.293.630	1.255.676.660	107.765.750	1.200.239.217	4.172.524.429	4.588.201.541	1.235.888.400	99,54	97,96	81,18	99,52	98,42		
Belanja Bahan / Material	32.301.161	0,00	0,00	0,00	0,00	32.084.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Jasa Kantor	978.049.379	2.314.646.000	2.260.314.300	2.434.431.970	1.602.476.600	924.761.349	2.133.251.443	2.226.847.929	2.391.628.042	1.551.326.286	94,55	92,16	98,52	98,24	96,80		
Belanja Iuran Jaminan /Asuransi	0,00	36.055.555	34.277.775	45.000.000	45.000.000	0,00	35.973.470	34.277.500	44.995.190	43.841.280	0,00	99,77	100,00	99,99	97,42		
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	136.658.000	0,00	0,00	0,00	0,00	124757961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Cetak dan Penggandaan	67.631.000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.449.050	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	124.200.000	580.640.000	538.576.972	290.250.000	0,00	124.000.000	428.640.000	537.810.972	288.976.500	0,00	99,84	73,82	99,86	99,56		
Belanja Sewa Rumah/Gudang/Parkir	0,00	168.000.000	108.100.000	0,00	0,00	0,00	166.250.000	108.100.000	0,00	0,00	0,00	98,96	100,00	0,00	0,00		
Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlatan Kantor	21.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Makanan dan Minuman	67.850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.426.850	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Pakaian Kerja	169.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.780.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Perjalanan Dinas	508.427.600	0,00	0,00	0,00	0,00	491.890.980	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	1.081.593.750	1.617.413.250	2.346.250.000	994.902.045	0,00	1.075.356.501	1.613.534.790	2.218.708.827	982.132.179	0,00	99,42	99,76	94,56	98,71		
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.265.905	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00		

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
***)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)	(17)
Belanja Pemeliharaan																	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	98.050.247	100.000.000	120.000.000	100.000.000	0,00	87.500.481	99.718.181	119.905.423	97.870.374	0,00	89,24	99,72	99,92	97,87		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	219.150.000	298.000.000	908.416.847	245.051.000	150.000.000	218.985.000	297.087.500	904.882.895	244.600.000	150.000.000	99,92	99,69	99,61	99,82	100,00		
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00		50.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00		
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00		100.000.000	75.000.000	0,00	0,00	0,00	99.900.000	75.000.000	0,00	0,00	0,00	99,90	100,00	0,00		
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	50.000.000	50.000.000	10.000.000	0,00	0,00	27.400.000	50.000.000	0,00	0,00	0,00	54,80	100,00	0,00	0,00		
Belanja Honorarium PNS	44.600.000	132.360.000	132.360.000	0,00	0,00	44.000.000	129.350.000	122.640.000	0,00	0,00	98,65	97,73	92,66	0,00	0,00		
Belanja Honorarium Non PNS	467.110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	445.460.000	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat/Pihak Ketiga	617.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
BELANJA MODAL	523.804.711	287.000.000	398.000.000	850.000.000	150.000.000	522.465.500	2.152.445.859	397.366.200	749.586.784	149.800.000	99,74	94,12	99,84	88,19	99,86		
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Modala Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor	0,00	1.838.000.000	0,00	550.000.000	0,00	0,00	1.837.600.000	0,00	549.936.784	0,00	0,00	99,98	0,00	99,99	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	199.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	198.642.909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga	118.100.000	90.271.200	259.978.318	64.602.089	133.000.000	117.678.000	0,00	259.567.000	64.554.825	132.800.000	99,64	0,00	0,00	99,93	99,84		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer	0,00	26.504.400	30.778.182	8.302.911	0,00	0,00	26.460.000	30.635.000	8.295.781	0,00	0,00	99,83	99,53	99,91	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer Unit	42.800.000	133.224.400	55.243.500	127.095.000	10.000.000	42.800.000	89.742.950	55.165.000	126.799.394	10.000.000	100,00	67,36	99,86	99,77	100,000		

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
***)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)	(17)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium	0,00	0,00	52.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.999.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	25.000.000	0,00	0,00	100.000.000	0,00	24.893.500	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	39.554.711	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	72.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	198.664.000	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan antara lain masyarakat, UMKM, pelaku usaha dan perusahaan.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri setiap harinya memantau perkembangan harga barang pokok dan barang penting, masyarakat menerima informasi harga barang pokok dan barang penting. UMKM merupakan penerima bantuan sarana dan prasarana perdagangan, dan juga untuk dibantu dalam pemasaran produk unggulan UMKM. Juga ada misi dagang yang membantu UKM untuk memasarkan produknya lintas Provinsi.

Dari Bidang Perdagangan Luar Negeri, setiap tahunnya selalu diadakan pembinaan bagi UKM yang berpotensi ekspor untuk diberi pelatihan dan pembinaan untuk memulai ekspor dan mengikuti pameran di Jakarta dimana para pembelinya berasal dari Luar Negeri.

Kelompok sasaran layanan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan masyarakat atau konsumen. Konsumen dapat melakukan pengaduan ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berada di Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan antara lain yang tergabung dalam Tim Satgas Pangan (Polda Sumatera Selatan, BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Bank Indonesia, Biro Perekonomian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan) selain itu dalam melakukan pengawasan turun bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Palembang.

2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang Memuat:

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Elaborasi permasalahan di internal Perangkat Daerah yang dirasakan oleh pegawai laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal akses dan partisipasi dalam pengembangan kapasitas SDM, dll. Data dan analisis kesenjangan gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Analisis Gender dapat menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) 4 Langkah, yakni : (1) Menentukan permasalahan utama layanan Perangkat Daerah; (2) Analisis permasalahan menggunakan pohon masalah; (3) Merumuskan Rencana Aksi (Program/Kegiatan/Subkegiatan); (4) Memetakan Perangkat Daerah utama dan Perangkat Daerah Pendukung yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah utama.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH		AKAR MASALAH
(1)	(2)		(3)
1.	Nilai Ekspor Tahun 2021-2024 tidak mencapai target	a.	Barang yang diekspor masih merupakan barang mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal
		b.	Harga komoditas ekspor yang berfluktuasi dan tergantung dari pasar dunia
		c.	Alih fungsi lahan ketika harga komoditi turun
2.	Pertumbuhan Ekspor Tahun 2021-2024 tidak mencapai target	a.	Barang yang diekspor masih merupakan barang mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal
		b.	Munculnya negara-negara pesaing baru dengan jenis komoditas ekspor yang sama dengan Sumsel
3.	Pusat Distibusi Regional (PDR) belum berfungsi secara Optimal	a.	PDR mengalami kerusakan /kebocoran dan terjadi Abrasi air sungai yang mengakibatkan belum dapat ber operasi secara optimal dan bangunan mengalami kemiringan

Sehingga jika disimpulkan maka permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Perdagangan antara lain sebagai berikut :

- a) Rendahnya surplus neraca perdagangan
- b) Nilai Perdagangan Antar Wilayah/Perdagangan Antar Pulau (Moda Transportasi Laut) tidak Tercapai
- c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen
- d) Belum optimalnya realisasi penerapan standarisasi produk untuk perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- e) Belum efisiennya arus barang dan konektifitas (Logistik, Distribusi dan Fasilitasi Perdagangan)

- f) PDR belum dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak berfungsi secara efektif.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumukan bahwa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan bidang perdagangan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Peralihan sistem perdagangan dari konvensional menuju digital di tengah pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi bagi laki-laki dan perempuan.
2. Masih rendahnya daya saing produk lokal.
3. Terbatasnya daya dukung pelabuhan “ Boom Baru “.
4. Kondisi pasar tradisional yang ada sebagian besar masih merupakan pasar desa dengan kondisi bangunan, sarana usaha dan fasilitas umum yang kurang representatif bagi penyandang disabilitas.
5. Bahan promosi terutama ke negara – negara Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin dan Asia Timur.
6. Belum optimal Laboratorium pengujian mutu barang & standarisasi produk.
7. Komoditi ekspor Sumsel pada umumnya masih berupa produk primer sehingga value added atau nilai tambah tidak diperoleh secara optimal.
8. Pada umumnya ekspor Sumsel berdasarkan sistem kontrak sehingga sangat dipengaruhi oleh naik turunnya kurs valuta asing.
9. Isu-isu Perubahan Iklim dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam perencanaan Program/Kegiatan OPD dan pelaksanaannya.
10. Dibuat kajian tentang Pusat Distribusi Regional (PDR) dan mencari lokasi baru serta menentukan langkah strategis untuk

memanfaatkan fungsi Pusat Distribusi Regional (PDR) sehingga dapat meningkatkan perdagangan antar wilayah.

Tabel 2.3 (Inmen 2/2025)
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH*)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rendahnya Surplus Neraca Perdagangan	Perkembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	Cuaca Ekstrem	Geopolitik dan Geoekonomi	Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	Peralihan Sistem Perdagangan dari Konvensional menuju Digital ditengah Pergeseran Gaya Hidup dan Pola Konsumsi Masyarakat
	Nilai Perdagangan Antar Wilayah/Perdagangan Antar Pulau (Moda Transportasi Laut) tidak Tercapai		Cuaca Ekstrem	Geopolitik dan Geoekonomi	Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	Masih Rendahnya Daya Saing Produk Lokal
	Masih Rendahnya Pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen		Misinformasi dan Disinformasi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	Terbatasnya Daya Dukung Pelabuhan "Boom Baru"
	Belum Optimalnya Realisasi Penerapan Standarisasi Produk untuk Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Misinformasi dan Disinformasi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum Optimal Laboratorium Pengujian Mutu Barang dan Standarisasi Produk
	Belum Efisiennya Arus Barang dan Konektifitas (Logistik, Distribusi dan Fasilitasi Perdagangan)		Misinformasi dan Disinformasi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	Bahan Promosi terutama ke Negara-negara Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin dan Asia Timur
	PDR Belum Dimanfaatkan secara Optimal Sehingga Tidak Berfungsi Secara Efektif		Misinformasi dan Disinformasi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	Dibuat Kajian tentang Pusat Distribusi Regional (PDR) dan Mencari Lokasi Baru serta Menentukan Langkah Strategis untuk Memanfaatkan Fungsi Pusat Distribusi Regional

						(PDR) sehingga Dapat Meningkatkan Perdagangan Antar Wilayah
--	--	--	--	--	--	---

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH*)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Komoditi Ekspor Sumsel pada Umumnya Masih Berupa Produk Primer sehingga Value Added atau Nilai Tambah Tidak diperoleh secara Optimal
						Pada Umumnya Ekspor Sumsel berdasarkan Sistem Kontrak Sehingga Sangat dipengaruhi oleh Naik Turunnya Kurs Valuta Asing
						Isu-isu Perubahan Iklim dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam Perencanaan Program/Kegiatan OPD dan Pelaksanaannya
						Kondisi Pasar Tradisional yang Ada Sebagian Besar Masih Merupakan Pasar Desa dengan Kondisi Bangunan, Sarana Usaha dan Fasilitas Umum yang Kurang Refresentatif

*) dapat merujuk pada isu dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPD.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu tiga tahun mendatang dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah	Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,85	13,92	13,99	14,06	14,13	14,20	14,27	

		1.Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa (%)	31,35	21,26	21,58	21,89	22,21	22,52	22,52	
		2. Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	6,13	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64	6,52	

Tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu lima tahun mendatang adalah “**Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan**”, yang dimaksud dengan meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah disini adalah majunya pertumbuhan nilai ekspor daerah dari sektor perdagangan baik di sektor perdagangan dalam negeri maupun di sektor perdagangan luar negeri.

Untuk menilai keberhasilan tujuan ini pada akhir periode Renstra, dapat diukur dengan indikator-indikator, indikator yang pertama Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran (%) dengan target di akhir periode sebesar antara 11%. Indikator yang kedua Neraca Perdagangan (US\$ juta) dengan target di akhir periode sebesar 5.354 US\$ juta. Sehingga agar tujuan ini dapat dicapai maka laju pertumbuhan masing-masing sektor harus selalu ditingkatkan secara signifikan melebihi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2 Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ekspor barang
 - a. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja persentase perubahan nilai ekspor barang, untuk target tahun pertama sebesar 5.637 juta US\$ dan di akhir periode sebesar 5.921 juta US\$.

- b. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan nilai ekspor Barang, untuk target per tahunnya sebesar 2,5%-5% dan di akhir periode 2,5%-5%.

2. Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja persentase Pusat Distribusi Regional (PDR) yang berfungsi dengan baik. Diharapkan targetnya 25%.

3. Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok, dimana target per tahunnya $\leq 5\%$ dan diakhir periode $\leq 5\%$.

4. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

- a. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja persentase penurunan pengaduan Konsumen. Diharapkan targetnya 0,05%;
- b. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja persentase penyelesaian permasalahan perselisihan Konsumen. Diharapkan targetnya 90%;
- c. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diharapkan targetnya 70%;

- d. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Diharapkan targetnya 100%.
5. Revitalisasi Pasar Cinde sebagai Bagian dari Program Strategis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasar tradisional merupakan bagian penting dari denyut nadi ekonomi kerakyatan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap sarana perdagangan yang nyaman dan representative, diperlukan upaya revitalisasi pasar sebagai pusat ekonomi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan budaya.

Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan berkomitmen untuk melakukan penataan dan pengembangan pasar tradisional, salah satunya adalah Revitalisasi Pasar Cinde di Kota Palembang.

Revitalisasi Pasar Cinde dan pasar tradisional lainnya merupakan langkah strategis dalam menciptakan system Perdagangan yang lebih inklusif, berdaya saing, serta berakar kuat pada identitas budaya lokal. Dengan pendekatan terintegrasi antara ekonomi, teknologi, dan budaya, pasar rakyat di Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Adapun target Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) sebagai berikut :

- Pembangunan Pasar Baru : 20 Unit
- Rehabilitasi pasar eksisting : 10 unit
- Total pasar yang akan di revitalisasi : 30 unit

Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional akan dilakukan berdasarkan usulan dan kebutuhan riil dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Di sektor perdagangan dalam negeri sasarannya adalah (1) Terkendalnya keterjangkauan harga, (2) Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan, dan (3) Meningkatnya infrastruktur perdagangan.

Untuk mencapai sasaran terkendalnya keterjangkauan harga, meningkatnya infrastruktur perdagangan serta meningkatnya akses dan jangkauan pelayanan dasar maka strategi yang dirancang adalah peningkatan integritas perdagangan antar pulau dan antar wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjangkau. Sedangkan arah kebijakannya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang kosmetik serta tercipta iklim usaha yang sehat.

Untuk sasaran meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan strategi yang dirancang adalah edukasi konsumen dan melakukan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta meningkatkan pelayanan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Arah kebijakan yang diambil adalah menambah volume diklat kepada konsumen sehingga konsumen menjadi lebih cerdas dan berdaya, meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta mengoptimalkan keberadaan BPSK.

Di sektor perdagangan luar negeri sasarannya adalah meningkatnya ekspor non migas luar negeri. Untuk mencapai sasaran meningkatnya ekspor non migas luar negeri tersebut strategi yang dirancang adalah peningkatan pertumbuhan nilai ekspor barang, jasa dan peningkatan daya saing. Arah kebijakan meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman kualitas produk ekspor. Selain itu untuk pengendalian barang impor dan peningkatan substitusi barang impor, arah kebijakannya adalah meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan lebih banyak menggunakan komponen lokal dibandingkan komponen impor.

3.3 Penahapan Pembangunan

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peletakan Pondasi & Inisiasi Strategis :	Stabilisasi Operasional & Perluasan Awal :	Peningkatan Skala & Perkembangan Kapasitas :	Optimalisasi Dampak & Penguatan Kemitraan :	Pemantapan Keberhasilan & Inisiasi Keberlanjutan	Penuntasan Target, Evaluasi Menyuluh, dan Perumusan Arah Keberlanjutan untuk Periode Berikutnya
Finalisasi Pemetaan dan Sosialisasi Program	Stabisasi Operasional Program Inisiasi 2025	Akselerasi & Peningkatan Skala Program Unggulan	Optimalisasi Dampak Program	Pemantapan Pencapaian Target Srategis	Penuntasan Seluruh Target Renstra
Persiapan Intensif Kelembagaan, SDM dan Infrastruktur	Penguatan Ekosistem Pendukung Kapasitas Pasar Rakyat	Peningkatan Kualitas Pendampingan Pasar Rakyat	Penguatan Jejaring dan Akses Pasar Rakyat	Fokus Kualitas & Keberlanjutan & Keberlanjutan Usaha Pasar Rakyat	Evaluasi Menyeluruh Dampak Pasar Rakyat
Pematapan Tata Kelola & SDM Internal Dinas	Inisiasi Perluasan Jangkauank ke Kabupaten/Kota	Perluasan Jangkauan & Pengembangan Kapasitas Pengelola	Peningkatan Skala Layanan & Penjajakan Kemitraan	Pemantapan Operasional & Fokus Keberlanjutan	Diseminasi Praktik baik & Perumusan Rekomendasi Strategis
Pencapaian Target Sarana Perdagangan	Penambahan Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Penambahan Sarana Perdagangan Kapasitas Pengelola	Penambahan Saran Perdagangan yang ditingkatkan Kualitas	Penambahan Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Penambahan Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan (Target 1.000 UMKM)
Peningkatan Kapasitas Pasar Rakyat	Penambahan Target Pasar Rakyat ber-SNI	Penambahan Target Pasar Rakyat ber-SNI	Penambahan Target Pasar Rakyat ber-SNI	Penambahan Target Pasar Rakyat ber-SNI	Penambahan Target Pasar Rakyat ber-SNI untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Target : 1 Kabupaten/Kota 5 Pasar SNI)

3.4 Penyajian Lokus

Bidang Urusan Program/Outcome Kegiatan/SubKegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	17.109.606.874	100%	30.397.898.515	100%	32.078.898.515	100%	33.727.998.515	100%	35.414.608.515	17 Kab/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	100%	100%	165.642.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	292.820.000	17 Kab/Kota
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	90.642.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	17 Kab/Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	3 Laporan	3 laporan	15.000.000	3 laporan	20.000.000	3 laporan	22.000.000	3 laporan	24.200.000	3 laporan	26.620.000	17 Kab/Kota
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 laporan	60000000	1 laporan	100000000	1 laporan	110000000	1 laporan	121000000	1 laporan	133100000	17 Kab/Kota
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Perubahan Harga Bahan Pokok Utama	≤5%	7,0%	200.000.000	6,88%	360.000.000	6,76%	396.000.000	6,64%	435.600.000	6,52%	479.160.000	17 Kab/Kota
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	70,00	70%	50.000.000	70%	100.000.000	70%	100.000.000	70%	100.000.000	70%	100.000.000	17 Kab/Kota

Bidang Urusan Program/Outcome Kegiatan/SubKegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	17 Kab/Kota
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	-	100	125.000.000	100	225.000.000	100	247.500.000	100	272.250.000	100	299.475.000	17 Kab/Kota
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya	-	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	117.500.000	100%	122.250.000	100%	124.475.000	17 Kab/Kota
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	117.500.000	1 Laporan	122.250.000	1 Laporan	124.475.000	17 Kab/Kota
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Perubahan Harga Bahan Pokok Utama	≤5%	7,0%	200.000.000	6,88%	360.000.000	6,76%	396.000.000	6,64%	435.600.000	6,52%	479.160.000	17 Kab/Kota

Bidang Urusan Program/Outcome Kegiatan/SubKegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas	Tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)	≤5%	7,0%	100.000.000	6,88%	200.000.000	6,76%	200.000.000	6,64%	235.600.000	6,52%	279.160.000	17 Kab/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	50.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	17 Kab/Kota

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana setiap tahun di masing-masing tahap dan membangun instrument monitoring dan evaluasi kolaboratif. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	KET.
(1)	(2)	(3)		(4)
1		Meningkatnya Ekspor Barang	Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor	
2		Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Menjaga Kestabilan Harga Pokok dan Barang Penting	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Keberhasilan suatu program yang erat kaitannya dengan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan sekaligus merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan. Program yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran didasari dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan, Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, program yang terdapat dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah :
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah.
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penyediaan Bahan/Material.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD.
- g. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Pengadaan Mebel.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan :

- a. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar :
 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya.
- b. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA.

C. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan :

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.
 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.
 - Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.
 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing – masing Kabupaten / Kota dalam Provinsi.

D. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting :

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah Provinsi.
 - Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat Distributor dan Sub distributor.
- b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

- Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota.
 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja.
- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.

E. Program Pengembangan Ekspor

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
- Pameran Dagang Internasional / Nasional
 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 - Pameran Dagang Lokal
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.
 - Peningkatan Citra Produk Ekspor.

F. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang
- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen.
 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah kabupaten/Kota.
- Pemantauan Mutu Produk.
 - Pengembangan Layanan Pengujian.
 - Pengembangan Layanan Kalibrasi.
- c. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota.

- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumendan tertib niaga.

G. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

- a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.
 - Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.
- b. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.
- c. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	
		1. Meningkatkan Ekspor Barang			Ekspor Barang dan Jasa		
			1. Meningkatkan penguatan Kapasitas dan Kompetensi Perilaku Usaha Ekspor		Tingkat Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Eksporthir	1. Program Pengembangan Ekspor	
				1. Meningkatkan Pelaku Usaha Ekspor Baru SetiapTahun	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekspor baru setiap tahun	1.1 Kegiatan Penyelenggar aan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih	

						dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	
--	--	--	--	--	--	---	--

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1.1.1 Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional /Nasional	
						1.1.2 Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	
						1.1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	
						1.1.4 Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			2. Meningkatnya kemudahan usaha perdagangan		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
				1. Kemudahan Proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	2.1. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
						2.2. Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	
						2.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	
			3. Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase Peningkatan Negara Tujuan Ekspor atau Persentase Peningkatan Jenis Produk Ekspor	3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				1. Peningkatan daya saing UKM (orientasi ekspor)	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	3.1 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
						3.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
						3.2 Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3.2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
						3.3 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Produk Dalam Negeri	
						3.3.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		2. Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		
			1. Meningkatnya Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Harga		Tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)	4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				1. Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	4.1 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
						4.2 Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sisten Informasi Perdagangan	
						4.2.1 Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						4.2.2 Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				2. Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Pasokan Barang Strategis	Persentase kinerja realisasi pupuk	4.3 Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan, Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya	
						4.3.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	
			2. Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang		Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 1 (satu) sarana perdagangan ber-SNI	5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1. Meningkatn ya Sarana Distribusi Perdaganga n	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	5.1 Kegiatan Pembanguna n dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
						5.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	
						5.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	
						5.1.3 Sub Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengembang an Pasar Lelang Komoditas	
			3. Meningkatny a Tertib Niaga dan Mutu Produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen	6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2.3.1 Meningkatn ya Penanganan Pengaduan Konsumen	Persentase Pengaduan Konsumen yang difasilitasi	6.1 Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	
						6.1.1 Sub Kegiatan Pemberdayaa n Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
				2.3.2 Meningkatn ya Komoditi Potensial yang sesuai dengan Ketentuan berlaku	Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	6.2 Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	
						6.2.1 Sub Kegiatan Pengembang an Layanan Kalibrasi	
						6.2.2 Sub Kegiatan Pengembang an Layanan Pengujian	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						6.2.3 Sub Kegiatan Pemantauan Mutu Produk	
				2.3.3 Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	6.3 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
						6.3.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
			4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
				1. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	7.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						7.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						7.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						7.1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				2. Terselenggara nya Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administراس Keuangan yang Terlayani	7.2 Kegiatan Administراس Keuangan Perangkat Daerah	
						7.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						7.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administراس Pelaksanaan Tugas ASN	
						7.2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Terselenggara nya Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	7.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						7.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				4. Terselenggara nya Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya	7.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						7.4.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				5. Terselenggara nya Administras i Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	7.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						7.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	
						7.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						7.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						7.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	
						7.5.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				6. Terselengga ranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik	7.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						7.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
						7.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				7. Terselengga ranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	7.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						7.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						7.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						7.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				8. Terselenggara nya Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik	7.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						7.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						7.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						7.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Matrik Program dan Kegiatan (RENSTRA) Pembangunan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan 5 (lima) tahun kedepan tergambar pada Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel .4.2.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas
PerdaganganProvinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Subkegiata n/Output	Indikator Outcome/Ou tput	Baseline 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	2,5-5%	6.862	554.156.243	7.006	225.000.000	7.216	405.000.000	7.499	445.500.000	7.693	490.000.000	7.825	539.055.000		
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekspor baru setiap tahun	3 Kali	2 Kali	554.156.243	4 Kali	225.000.000	4 Kali	405.000.000	4 Kali	445.500.000	4 Kali	490.000.000	4 Kali	539.055.000		
Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Internasional/ Nasional	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	339.996.243	2 pelaku usaha	50.000.000	3 pelaku usaha	105.000.000	3 pelaku usaha	145.500.000	3 pelaku usaha	190.050.000	3 Pelaku usaha	200.055.000		
Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	214.160.000	2 pelaku usaha	50.000.000	3 pelaku usaha	100.000.000	3 pelaku usaha	100.000.000	3 pelaku usaha	100.000.000	3 Pelaku usaha	139.000.000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/K egiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Outp ut	Baseline 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	-	0	5 Produk	75.000.000	5 Produk	100.000.000	5 Produk	100.000.000	5 Produk	100.000.000	5 Produk	100.000.000		
Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-	-	0	2 Pelaku Usaha	50.000.000	2 Pelaku Usaha	100.000.000	2 Pelaku Usaha	100.000.000	2 Pelaku Usaha	100.000.000	2 Pelaku Usaha	100.000.000		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	1200 unit	90%	2.422.130.400	90%	500.000.000	92%	1.000.000.000	94%	1.100.000.000	96%	1.210.000.000	98%	1.331.000.000	Program Revitalisasi Pasar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pasar-pasar Rakyat, Memprkuat Ekonomi Kerakyatan	
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi	1200 unit	90%	2.422.130.400	90%	500.000.000	92%	1.000.000.000	94%	1.100.000.000	96%	1.210.000.000	98%	1.331.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan bagi UMKM	1200 Unit	2400 Unit	2.112.000.000	2400 unit	400.000.000	2400 unit	690.000.000	2400 unit	780.000.000	2400 unit	880.000.000	2400 unit	991.000.000		

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Subkegiatan/O utput	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalia n Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribubasi Regional dan Pusat Distribubisi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	209.056.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	140.000.000		
Sub Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengembang an Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang berpartisipasi	50 Orang	50 Orang	101.074.400	50 Orang	50.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000		
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	-	100,00	34.248.400	100	125.000.000	100	225.000.000	100	247.500.000	100	272.250.000	100	299.475.000		
Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya	-	100%	34.248.400	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	117.500.000	100%	122.250.000	100%	124.475.000		
Sub Kegiatan Pengawasan Distribubisi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribubisi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan	1 Laporan	34.248.400	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	117.500.000	1 Laporan	122.250.000	1 Laporan	124.475.000		
Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	21,82%	0	21,82%	75.000.000	22,12%	125.000.000	22,42%	130.000.000	22,72%	150.000.000	23,02%	175.000.000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Outp ut	Indikator Outcome/Outp ut	Baseline 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	-	0	6000 dokumen	75.000.000	6000 dokumen	125.000.000	6000 dokumen	130.000.000	6000 dokumen	150.000.000	6000 Dokumen	75.000.000		
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	1.) 90% 2.) 100% 3.) 70%	90%	711.886.414	90%	450.000.000	90%	900.000.000	90%	990.000.000	90%	1.089.000.000	90%	.143.450.000		
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang difasilitasi	90,00	90%	339.838.714	90%	250.000.000	90%	400.000.000	90%	490.000.000	90%	589.000.000	90%	43.450.000		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah BPSK yang aktif	2 BPSK	2 BPSK	339.838.714	2 BPSK	200.000.000	2 BPSK	250.000.000	1. 2 BPSK 2. 100 orang	340.000.000	1. 2 BPSK 2. 100 orang	439.000.000	1. 2 BPSK 2. 100 orang	93.450.000		
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100,00	100%	232.245.200	100,00%	150.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	00.000.000		
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100.891.200	1 sertifikat	50.000.000	1 sertifikat	150.000.000	1 sertifikat	150.000.000	1 sertifikat	150.000.000	1 Sertifikat	50.000.000		
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifi kat Pengujian yang diterbitkan	1 Laporan	1 Laporan	131.354.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 Laporan	50.000.000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/K egiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Outp ut	Baseline 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang dipantau	3 Produk	-	0	3 produk	50.000.000	3 produk	100.000.000	3 produk	100.000.000	3 produk	100.000.000	3 Produk	00.000.000		
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	70,00	70%	139.802.500	70%	50.000.000	70%	100.000.000	70%	100.000.000	70%	100.000.000	70%	100.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Barang Beredar yang diawasi	12 Laporan	12 Laporan	139.802.500	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000		
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/Dilaksanakan	100,00	100%	122.500.000	100%	150.000.000	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	381.150.000		
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi	10 UMKM	5 UMKM	122.500.000	5 UMKM	50.000.000	10 UMKM	100.000.000	10 UMKM	130.000.000	10 UMKM	163.000.000	10 UMKM	181.150.000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/K egiatan/Subkegiatan/Output	Bidang Urusan/Progra m/Outcome/Ke giatan/Subkegia tan/Output	Baseline 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM	5 UMKM	122.500.000	5 UMKM	50.000.000	10 UMKM	100.000.000	10 UMKM	130.000.000	10 UMKM	163.000.000	10 UMKM	181.150.000		
Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi	100 UMKM	-	0	5 UMKM	50.000.000	10 UMKM	100.000.000	10 UMKM	100.000.000	10 UMKM	100.000.000	10 UMKM	100.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasara n Penggunaa n Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasakomodasi	100 UMKM	-	0	5 UMKM	50.000.000	10 UMKM	100.000.000	10 UMKM	100.000.000	10 UMKM	100.000.000	10 UMKM	100.000.000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/K egiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Outp ut	Baseline 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi	1 Laporan	-	0	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	-	0	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Perubahan Harga Bahan Pokok Utama	≤ 5%	7,13	419.006.800	7,0%	200.000.000	6,88%	360.000.000	6,76%	396.000.000	6,64%	435.600.000	6,52%	479.160.000		ProgramP ertumbu han Ekonomi Kegiatan Pengenda lian Inflasi
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Daerah Provinsi	≤ 5%	-	0	7,0%	50.000.000	6,88%	60.000.000	6,76%	96.000.000	6,64%	100.000.000	6,52%	100.000.000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	-	0	1 laporan	50.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	96.000.000	1 laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/K egiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Outp ut	Baseline 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sisten Informasi Perdagangan	Tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)	≤ 5%	0%	380.752.000	7,0%	100.000.000	6,88%	200.000.000	6,76%	200.000.000	6,64%	235.600.000	6,52%	279.160.000		
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kot a	12 laporan	12 laporan	93.152.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000		

Bidang Urusan/Program/Outcome/K egiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Outp ut	Baseline 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahunan												Ket****	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins	6 Laporan	3 Laporan	287.600.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	3 laporan	135.600.000	3 Laporan	179.160.000		
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya	Persentase Kapasitas dan Ketahanan Pasokan Barang Strategis	100%	100%	38.254.800	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	1 Laporan	1 Laporan	38.254.800	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3
Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Revitalisasi Pasar Tradisional	Meningkatnya Kapasitas Pasar-pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan	Penyediaan Saranan dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	

4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,85	13,92	13,99	14,06	14,13	14,20	14,27	
2.	Ekspor Barang dan Jasa	%	16,84	21,26	21,58	21,89	22,21	22,52	22,84	
3.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	6,13	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64	6,52	

Pada tabel di atas dapat dilihat indikator kinerja yang pertama adalah Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%). Kondisi kinerja pada awal periode RPD adalah Tahun 2025 sebesar 13,92%. Ditargetkan pada akhir periode RPD sebesar 14,27%. Indikator yang kedua adalah Ekspor Barang dan Jasa (%), kondisi kinerja pada awal periode RPD adalah Tahun 2025 sebesar 16,84%. Ditargetkan pada akhir periode RPD sebesar 22,84%. Indikator yang terakhir adalah Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi, ditargetkan Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi

sebesar 5% - 7%.

Program-program bidang perdagangan untuk mendukung kinerja Dinas Perdagangan antara lain :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 5. Program Pengembangan Ekspor;
- 6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Adapun Indikator untuk target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2030 dikemukakan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	6,13	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64	6,52	
2	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Baru setiap Tahun	%	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
3	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
5	Persentase Penangan Pengaduan Konsumen	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
6	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Tingkat Kepatuhan Pedagang terhadap Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)	Pedagang	0	0	50	60	70	80	90	
8	Persentase Komoditi yang sesuai dengan Ketentuan berlaku	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
9	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	75%	
10	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	0	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan perdagangan dalam menyusun program dan kegiatan perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2025 – 2029). Terutama pada upaya pencapaian misi kedua dalam rangka “Mewujudkan Ketahanan Ekonomi berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Peran Gender dalam perilaku yang dipelajari dari komunitas atau masyarakat tempat seseorang tinggal atau dibesarkan. Dalam kondisi tersebut aktivitas, tugas dan tanggung jawab kemudian dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Peran gender juga dipengaruhi usia, kelas, ras, etnik, agama, kondisi geografis, ekonomi, dan lingkungan, juga politik, termasuk aktivitas pembangunan.

Inklusi sosial merupakan proses kompleks dan multidimensi, menyangkut kekurangan atau penyangkalan terhadap hak atas sumber daya, barang dan layanan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam hubungan yang normal dan aktivitas yang tersedia bagi kelompok mayoritas dalam masyarakat. Termasuk dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan kesetaraan serta solidaritas dalam masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah mencapai kemakmuran, keadilan, dan perlindungan secara terpadu. Pembangunan berkelanjutan melalui dimensi ekonomi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong inovasi dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Dengan memperhatikan kondisi strategis sebagai faktor pendorong pengembangan perdagangan diarahkan untuk mencapai sasaran tumbuh dan berkembangnya perdagangan yang mengandalkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki. Disadari bahwa keterkaitan kegiatan

pembangunan yang sudah dilakukan tersebut masih diperlukan perbaikan serta evaluasi pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

Dengan suatu keyakinan maka secara optimis diharapkan Rencana Strategis ini sebagai salah satu pedoman dan perangkat untuk pencapaian sasaran pengembangan akan dapat terselenggara dan akan menjadi pedoman pengembangan oleh berbagai pihak terkait.

Selanjutnya disadari juga bahwa dalam pembuatan RENSTRA Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ini, dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan untuk evaluasinya. Karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan RENSTRA di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga RENSTRA ini dapat dijadikan sebagai sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perdagangan di masa yang akan datang agar tercapai kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik lagi.